

**Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera
Utara**

Oleh : Rini Hayati Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

ABSTRACT

Years 2014-2015 the number of poor people increased by 1.46367 million inhabitants, especially in rural areas in the province of North Sumatra is the number one cause of unemployment increases, and therefore the necessary role of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) to the economy of North Sumatra especially rural communities

BMT role towards improving the economy of North Sumatra give a positive thing that the development and financing of small businesses, helping to break the dependence on moneylenders, maintaining economic justice community with equitable distribution and makes the society to be able to apply sharia-based economy

Keywords: *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Small Micro Medium Enterprises (SMEs), Economy, Poverty.*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan hal yang sangat momok bagi penghambatan pembangunan nasional yang sering kali dihadapi oleh setiap negara berkembang, artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomian di negara akan mengalami dampak depresi. Setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau indikator dalam perubahan perekonominya yaitu pendapatan nasional riil, pendapatan riil kapita, kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran, yang dikatakan sejahtera ialah masyarakat mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diukur dengan pendapatan selain itu juga adanya kelancaran distribusi barang dan jasa.

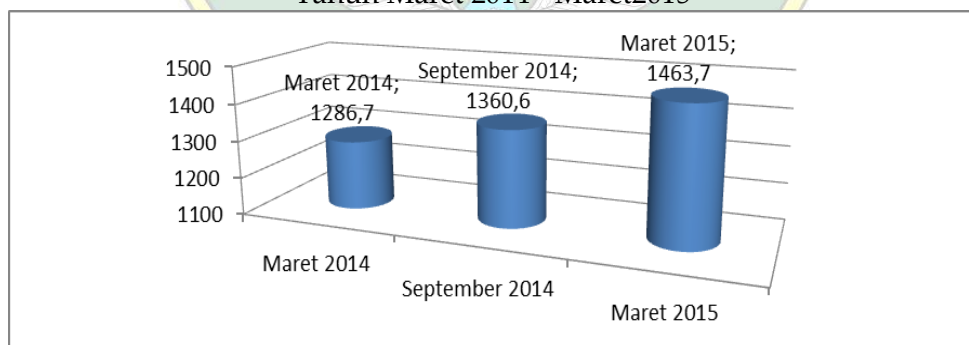
Saat ini perkembangan ekonomi Indonesia masih dikatakan lemah hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal dimana meningkatnya jumlah belanja negara terutama pada pengeluaran belanja barang (34%) dan belanja modal (58,10%) serta

tingkat inflasi mencapai 6,83%, sedangkan untuk faktor eksternal yaitu lemahnya harga komoditas primer dan melemahnya perekonomian negara-negara lain serta melemahnya nilai rupiah terhadap dollar amerika (AS) ¹

Lemahnya pertumbuhan ekonomi negara akan menghambat laju aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia begitu juga dengan perkembangan perekonomian yang ada di Sumatera Utara yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan antara pengeluaran dengan penerimaan provinsi. Akibat dari ketidakstabilan ini berdampak terhadap taraf kehidupan masyarakat di wilayah tersebut sehingga masyarakat yang dikatakan sejahtera masih jauh untuk diwujudkan. Dan apabila ini tidak terselesaikan maka jumlah tingkat kemiskinan akan bertambah.

Menurut data BPS pada bulan Maret 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.463.670 orang atau sebesar 10,53 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.360.600 orang atau sebesar 9,85 persen. Dengan demikian, ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 103.070 orang serta peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,68 poin. Perkembangan tingkat kemiskinan dapat lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Tahun Maret 2014 - Maret 2015



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2014 -2015 disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Inflasi selama periode September 2014 – Maret 2015 meningkat menjadi 3,49 persen, dari 2,55 persen pada periode sebelumnya (Maret 2014 – September 2014).

- b. Nilai Tukar Petani mengalami penurunan, yaitu dari 99,76 pada September 2014 menjadi 99,09 pada Maret 2015.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 6,23 persen pada Agustus 2014 menjadi 6,39 persen pada Februari 2015.
- d. Demikian pula Pertumbuhan Ekonomi melambat, yaitu dari 5,41 persen pada Triwulan III 2014 menjadi 4,83 persen pada Triwulan I 2015²

Islam sebagai agama samawi yang menghendaki kemakmuran bagi umatnya. Kemakmuran tersebut tidak semata-mata hasil kerja sendiri, tetapi ada campur tangan tuhan didalamnya. Islam memberikan aturan cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemilik untuk berusaha membantu sesama². Sesuai dengan surah Al-Baqarah : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Usaha dalam penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah penguatan berbagai aspek di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk produktif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hill (2001), menyatakan bahwa UMKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena :

- a. Kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.

- b. Pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UMKM.
- c. Potensi kontribusi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli.
- d. Pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik UMKM.
- e. Harapan atas kontribusi UMKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri.
- f. UMKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998.

Data terakhir yang diperoleh bahwa UMKM mencapai 51,3 juta unit usaha dan memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun (55,6%) Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%) (Bank Indonesia. 2010). Dengan data perkembangan UMKM yang diungkapkan diatas artinya tingkat pengangguran dapat teratasi.

Jumlah populasi penduduk Indonesia pada umumnya bermayoritas beragama Islam maka dari itu sistem Perbankan Syariah akan memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi diyakini praktek Perbankan Syariah beserta produknya sangat sesuai dengan iklim dunia usaha sektor UMKM. Adapun yang termasuk dalam perbankan syariah yang memberikan kontribusi kepada UMKM yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di bandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan bermasalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruang lingkup pelayanan yang juga relatif sama, dalam melayani masyarakat UMKM, BPRS ditemani oleh lembaga keuangan non-bank Syariah yang saat ini berkembang tidak kalah pentingnya, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Perkembangan BMT saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak didirikan padatanggal 14 Juni 2005 sampai Tahun 2011 BMT sudah memilik 432 BMT yang menjadi anggotanya, Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain: Jawa Tengah, Yogyakarta,

Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera dan Aceh dan lain-lainnya³. Adapun aset yang diperoleh dari BMT pada bulan desember 2005 dimana BMT center masih beranggotakan 96 BMT, total aset para anggota adalah sekitar Rp 364 milyar. Dengan adanya pertumbuhan selama tahun berjalan dan penambahan beberapa anggota baru, maka sampai dengan akhir tahun 2006, aset total adalah sekitar Rp 458 miliar. Nilai ini terus meningkat menjadi Rp 695 miliar pada akhir tahun 2007, hampir mencapai Rp 1 trilyun pada akhir tahun 2008, dan sekitar Rp 1,6 trilyun pada akhir 2009. Nilai tersebut diperkirakan sekitar 50 persen dari total BMT yang mencapai lebih dari Rp 3 trilyun.

BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana.. Sementara itu, perkembangan pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio *financing to deposit ratio* (FDR), yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain, seperti perbankan syariah.⁴

Dengan adanya kehadiran BMT dapat membantu dalam mananggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan solusi bagi penanggulangan kemiskinan melalui dengan prorgam UMKM yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk daerah-daerah atau wilayah yang taraf kehidupan masyarakat masih dikatakan golongan menengah kebawah, maka dalam penulis ini akan membahas tentang bagaimana peranan BMT terhadap peningkatan perekonomian wilayah khususnya perekonomian sumatera utara melalui UMKM untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara

Pembahasan

Sejarah BMT

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal Wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tanwil. Secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha.

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan islam, dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran BMT akan terlihat dari defenisi Baitul Maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari defenisi Baitul Tamwil sebagai lembaga sosial

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum diIndonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP)⁵

Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur'an ayat Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sesuai dengan ayat diatas maka BMT dapat simpulkan bahwa BMT ini digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silahturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro, kesadaran dalam menolong sesama kaum muslim dimulai dari permasalahan yang muncul pada saat kehadiran Bank Mualamat Indonesia 1992 yang memberikan inspirasi dalam membangun

kembali mengenai sistem keuangan yang dikhususkan pada golongan kalangan bahwa, akan tetapi harapan ini terhambat dikarenakan oleh undang-undang perbankan mengenai prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap usahawan akan tetapi usaha kecil/mikro yang tidak mampu memenuhi peraturan perbankan yang telah ditetapkan oleh UU, hal inilah yang menghambat BMI untuk menjelaskan misinya, untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bahwa maka dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), nama prekreditasi sesungguhnya tidak tepat, karena didalam islam tidak melayani adanya prekreditasi tetapi pembiayaan. Untuk harapan kedepannya BPRS memberikan peluang yang baik, akan tetapi realitasnya sistem bisnis BPRS ini terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemiliki modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bahwa mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum prosedur pinjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dengan sisi teknisnya, padahal inilah menjadi penghambat utama bagi pengusaha kecil sehingga harapan besar pada BPRS hanya menjadi idealita saja, maka dari itu dibuatlah suatu lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga ada berhubungan dengan sosialnya.

Peran BMT Dalam Perekonomian

Sistem perekonomian yang dianut oleh negara Indonesia adalah perekonomian pancasila yakni sistem ekonomi campuran yang berdasarkan nilai – nilai pancasila. Arti dari sistem ini yaitu yang menganut sistem pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalannya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.

Akan tetapi pada kenyataannya sistem ekonomi pancasila tidaklah sama dengan realitasnya. Sistem ekonomi Indonesia semakin lama terlihat semakin menuju liberal khas Amerika artinya nilai – nilai ekonomi pancasila mulai ditinggalkan, dan munculnya persaingan usah baru yang didominasi oleh swasta, terutama oleh swasta asing melalui kerjaan bisnis multi nasional corporation. Keadaan ini jelas membahayakan dan merugikan. Dikatakan berbahanya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan dan juga akan terjadi persaingan

usaha tidak sehat seperti monopoli oleh perusahaan perusahaan besar terutama asing yang akhirnya akan merugikan konsumen dalam hal ini rakyat dan mematikan usaha usaha dalam negeri. Fenomena yang terjadi pada persaingan tidak sehat saat ini yaitu tergusurnya pasar tradisional yang digantikan oleh pasar modren diketahui bahwa sebagian besar modal (inventasi) berasal dari asing, hal ini akan berdampak pada lemahnya ekonomi rakyat dan ekonomi nasional yang disebabkan masuknya paritel besar dari perancis seperti Carrefour, pasar – pasar tradisional tergusur⁶.

Maka dari itu diperlukan adanya peranan lembaga-lembaga yang mampu meningkatkan taraf ekonomi rakyat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan perekonomian negara yang dapat bersaing dengan sektor swasta lainnya. Salah satu lembaga yang memiliki peranan dalam meningkat perekonomian adalah BMT yang berbasis koperasi, yang kita ketahui bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peranan BMT sangat vital dalam pengembangan perekonomian di Indonesia terutama pemberdayaan UMKM

Dari data survei BPS (2007) menyatakan bahwa terdapatnya kurangnya dalam permodalan hal ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM dan akan mengakibatkan UMKM tidak dapat berperan secara optimal selain dari lemahnya permodal adapun faktor-faktor lainnya yang menghambat perkembangan UMKM antar lain kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan atau skill dan kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Dalam hal pemenuhan permodal UMKM melakukan adanya kredit terhadap bank yang merupakan sumber permodalan bagi UMKM. Ada beberapa kesenjangan antara bank dan UMKM yaitu :

1. Kesenjangan skala antara besarnya pinjaman yang diharapkan bank dengan maksimal kebutuhan kredit MKM yang relatif kecil yang mengakibatkan bank enggan menyalurkan kredit kepada nasabah UMKM.
2. Kesenjangan antara persyaratan formal bank seperti ijin-ijin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat tanah sehingga banyak UMKM yang belum memiliki ijin usaha sulit memperoleh kredit dari perbankan.
3. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang umumnya diketahui oleh

UMKM misalnya persyaratan dan prosedur bank, jaminan/agunan dan suku bunga tinggi.⁷

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kesenjangan antara bank dengan UMKM, membuat lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan yang berbasis syariah bekerja sama dengan UMKM hingga saat ini salah satunya BMT.

Fungsi, Manfaat Dan Peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Adapun fungsi BMT (Soemitra, 2009: 448) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *gharim* (yang berhutang) sebagai *shahibul maal* dengan *duafa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Manfaat dan Tujuan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dalam skala kecil dan menengah, menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT (Suhendi, 2004: 41), antara lain:

- a. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah.
- b. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman baik secara syari'i maupun ekonomi.
- c. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, di mana BMT membuat setiap transaksi keuangan, memperoleh kredit dan pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat Islam.

- d. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam.
- e. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir.
- f. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Islam termasuk di dalamnya BMT.

Adapun peranan BMT (Musfidin, 2012) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi Islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia
- c. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
- d. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT
- e. Kemandirian yakni mandiri diatas golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya
- f. Profesionalisme yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan yang artinya kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup,

keterampilan yang terus ditingkatkan dan niat yang kuat, yang semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual

- g. Istiqomah ; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada ALLAH SWT kita berharap

Perkembangan BMT Di Sumatera Utara

Perkembangan BMT menurut data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) di Sumatera Utara berjumlah 48 BMT tahun 2010, adapun rincian nama dan alamat BMT dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan BMT di Sumatera Utara sudah dikatakan cukup baik dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki 4 BMT, Sumatera Barat memiliki 6 BMT, dan Jambi memiliki 3 BMT, akan tetapi pada kenyataan tingkat jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari data BPS 2015 menyatakan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di pedesaan meningkat sebesar 764,37 (10,89%) dari tahun 2014, begitu juga dengan perkotaan mencapai 699,30 (10,16%) meningkatnya jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan Sumatera Utara akan berdampak pada perekonomian, maka dari itu perlukan adanya sosialisasi yang digerakan oleh BMT guna memperkenalkan produk-produk BMT kepada masyarakat desa khususnya, agar masyarakat desa mengetahui fungsi dan peranan BMT terhadap perekonomian maupun meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Tabel 1 : Nama dan Alamat BMT di kota Medan

N	Nama-nama BMT	Alamat
1	BMT RAMADHAN	Jl. Puskesmas No. 683 Bandar Khalifah – Tembung
2	BMT NURUL HIJRAH	Jl. Puskesmas Dusun VII No. 33-C Bandar Khalifah – Tembung
3	BMT KUBE SEJAHTERA 003	Jl. M. Yaqub Lubis No. 195 Dusun IV Bandar Kahlifah
4	BMT KUBE SEJAHTERA 001	Jl. Pengabdian No. 35-B Bandar Setia
5	BMT EL-HAFIZ	Jl. Bromo No. 28

6	BMT QANIA	Jl. Bromo Gg. Aman No. 10
7	BMT EL-RIDHO	Jl. Bromo No. 64-A
8	BMT AL-MUNAWAR	Jl. A.R. Hakim No. 135 Lantai 2, Kel. Pasar Merah Timur, Medan Area
9	BMT AMANAH RAY	Jl. Sutrisno No. 732
	Sutrisno No. 732	
10	BMT GPA MANDIRI	Jl. Sisingamangaraja No. 114
11	BMT EL-IKLA	Jl. Bridgejen Katamso
12	BMT AL-KAUTSAR	Setia Budi
13	BMT ANANDA PUTRA	Jl. Bersama No. 122 A
14	BMT HARAPAN MANDIRI	Klambir 5
15	BMT SYARIAH MANDIRI	Jl. Pasar V Tembung
16	BMT DIRGANTARA	Jl. Medan – Batang Kuis No. 66
17	BMT MASYARAKAT MADANI	Jl. Sidomulyo Dusun XIII Tembung
18	BMT ZAM-ZAM	Jl. Letda Sujono No. 32
19	BMT LKM – BMT TERPADU	Jl. Makmur Dusun VII Tanjung. Kantor Desa Sambirejo Timur 20371
20	BMT EL- HIJRAH 01	Jl. Beringin Pasar VII No. 59
21	BMT AMANAH SEJAHTERA	Jl. Besar Tembung No. 01
22	BMT BMT EL-SABIL	Jl. B. Zein Hamid Gg. Sepakat No. 2- A Titi Kuning Medan
23	BMT WAASHIL	Jl. Gatot Subroto Sei Kambing Medan
24	BMT AR – ROUDAH	Pesantren Ar-Roudah
25	BMT BANGUN BERSAMA	Batang Kuis
26	BMT P3TM PETISAH	Pasar Petisah Lantai 2
27	BMT MITRA BANGSA	Bandar Setia
28	BMT SEJAHTERA	Klumpang, Amparan Perak
29	BMT SERUMPUN	Jl. Sultan Mukmin Al-Rasyid
30	BMT AL – AMELINA	Jl. Mahkamah
31	BMT PUTI BATUAH	Jl. Perjuangan no.72, Setia Budi
32	BMT MES	Jl. Gagak Hitam
33	BMT AR-RIDWAN	Jl. Ayahanda – Gatot Subroto
34	BMT AMANAH SYARIAH	Jl. Perhubungan No. 17
35	BMT KUBE SEJAHTERA	Jl. Perhubungan No. 47 Laut

	BERSAMA			Dendang
36	KSP KAHMI	DELI		Jl. Binjai Km. 10,8 Medan
	SEJAHTERA			
37	BMT EL KUBE	CITRA		Jl. Sudirman Dsn III No. 18 Kec.
	BERSAMA			Percut Sei Tuan Kab. Deli
				Serdang
38	BMT KB AMIN			Jl. Brigdejen Katamso No. 387
39	BMT BINA	MITRA		Jl. H.M. Yamin No. 504
	MANDIRI (Pusat)			
40	BMT BINA	MITRA		Jl. Durung 14
	MANDIRI (Cabang)			
41	BMT AR-RAHMAN			Jl. Gaperta komp. Trikarya
42	BMT AR-RAUDHATUL			Jl. Jamin Ginting
	HASANAH			
43	BMT AL-MASYHUR			Jl. Karya Kasih
44	BMT AS-SALAM			Jl. Gaharu Medan
45	BMT MUSLIMIN			Jl. Laksana Medan
46	BMT AL-AMILINA			Jl. Mahkamah No. 66A
47	BMT JUM'AT			Jl. Sunggal Komp. Pusri No. 10
48	BMT USWAH	HASANAH		Jl. Sentosa Baru No. 53
	YAMKI			

Sumber: PINBUK Sumut 2010

Peluang Dan Hambatan Dalam Perkembangan BMT

BMT memiliki banyak peluang untuk dikembangkan di masa mendatang karena alasan berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
- b. Peluang pasar yang luas
- c. Kebijakan pemerintah
- d. Akuntabilitas publik
- e. Kerja sama inter-antar lembaga

Untuk eksistensinya di masa depan, BMT akan dihadapkan kepada berbagai tantangan dan kendala sebagai berikut:

- a. BMT masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga jumlah nasabahnya pun tidak terlalu banyak.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki perhatian dan kompeten di bidang ekonomi syariah, khususnya bagi mereka yang secara personal aktif menjadi praktisi lembaga keuangan syariah. Universitas Sumatera Utara

- c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang bagi pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat.
- d. Kurang promosi terhadap lembaga itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap BMT masih kurang.
- e. Mayoritas orang – orang kota mempunyai rasa gengsi untuk menabung dalam jumlah kecil.
- f. Minimnya modal yang dimiliki oleh lembaga BMT.
- g. Minimnya dukungan lembaga lain terhadap lembaga ini, karena lembaga BMT dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat di wilayah tertentu.

Strategi Pengembangan BMT

Peranan BMT dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan dampak positif, hal ini disebabkan BMT menegakan prinsip-prinsip syariah yang telah memberikan kesejukan dan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun pengguna dana, selain memberikan dampak positif untuk perkembangan BMT sangat signifikan mulai terbentuknya BMT tahun 1998 yang berjumlah 1.957, tahun 2001 BMT mulai bertambah menjadi 2.938 unit. Dan untuk tahun 2009 BMT sudah mencapai 4.000an.

Namun harus diakui bahwa pengembangan BMT masih membutuhkan kerja keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan mengenai pertumbuhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia⁸ terdapat rekomendasi yang disusulkan dalam rangka pengembangan BMT yaitu :

- a. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah 50 juta). Pada nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank
- b. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya, kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan BMT lebih lanjut.
- c. Dapetermen koperasi seharusnya memperkasai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya

- d. Uapay-upaya untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah
- e. Departemen koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan menonjolkan berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT- BMT termuka
- f. Dinas koperasi dan departemen koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat melalui adanya pelatihan yang diperuntukan kepada masyarakat
- g. Asosiasi-asosiasi BMT didaerah sebaiknya direformasikan kelompok-kelompok ini seharusnya berbagai informasi dan mengembangkan prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga.
- h. BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya
- i. BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para anggotanya aman, dan juga diperlukan adanya peningkatan usaha-usaha sosial yang membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial.
- j. Untuk jangka pendek BMT harus memasukkan kedalam UU tentang koperasi lebih layak. Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan operator BMT yang aktif dewasa ini
- k. Dalam jangka panjang, perlu dibuat satu UU dan menyeluruh yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan disini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap UU zakat yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran BMT dalam perekonomian memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi

masyarakat dengan distribusi yang merata serta menjadikan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis syariah, yang tujuan akhirnya dalam peranan BMT ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan perumbuhan ekonomi di indonesia

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis menyarankan agar BMT lebih aktif dalam memperkenalkan produk BMT kepada masyarakat pedesaan dan mengoptimalkan perkembangan BMT di Sumatera Utara

Catatan

-
- ¹ Silvanus Alvin. “Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Target Pemerintah” liputan 6.com, diakses 06/11/2015
 - ² Bps, Sumatera Utara Dalam Angka 2014
 - ³ www. Inkopsyahbmt.co.id
 - ⁴ Rizky, Awalil. Perkembangan BMT dari tahun ke tahun, puskopsyah lampung, diakses 05/05/2013
 - ⁵ Ridwan, muhamad. Manajemen baitul maal wa tamwil (BMT), yogyakarta, 2004
 - ⁶ Budiyanto, arif. Pengaruh BMT terhadap sistem perekonomian di indonesia
 - ⁷ Rekdaksi. Perekonomian indonesia 2011-2012 tantangan akses likuiditas dan dampaknya bagi LKM, PBMT ventura, diakses 05/05/2011
 - ⁸ M. Umer & Habib Ahmed, *Coorporate Governance Lembaga Keuangan. Syariah*, Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2008.